

## PERAN MAHASISWA MAGANG DALAM TRANSFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS RISET DAN INOVASI DI BAPPEDA KABUPATEN DAIRI

Rita Hati Ndruru<sup>1</sup>, T. Sihol Nababan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen

Email: [rita.ndruru@student.uhn.ac.id](mailto:rita.ndruru@student.uhn.ac.id), [sihol.nababan@uhn.ac.id](mailto:sihol.nababan@uhn.ac.id)

### Abstract

*Indonesian development planning still relies on traditional methods involving annual routines, resulting in limited access to data, research findings, and innovation. The complexity of development issues, such as climate change, technological advancements, and community needs, requires more evidence-based design. In this regard, the Dairi Regency Development Planning Agency (Bappeda) plays a crucial role in driving changes in regional development planning toward a more research- and innovation-based approach. This study aims to examine the process of this change in development planning practices in Dairi Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including direct observation of the planning process, analysis of regional planning documents and policies, and searching for available development data online. The findings indicate that the Dairi Regency Development Planning Agency (Bappeda) has begun to integrate development data such as the Human Development Index, poverty levels, and Gross Regional Domestic Product (GDP) as a basis for formulating programs and activities. Furthermore, the use of planning information systems and the application of innovation in policymaking have also strengthened Bappeda's role as a development planning director. These changes encourage planning that is more measurable, rational, and responsive to regional needs. Therefore, research- and innovation-based planning is a crucial step in strengthening evidence-based regional development policies in Dairi Regency.*

**Keywords:** *Regional development planning; research and innovation; Bappeda; planning information system; Dairi Regency*

### Abstrak

Perencanaan pembangunan Indonesia masih mengandalkan metode tradisional yang melibatkan rutinitas tahunan, sehingga mengakibatkan terbatasnya peluang terhadap data, hasil penelitian, dan inovasi. Kerumitan isu pembangunan, seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan keperluan komuniti, memerlukan perancangan yang lebih berdasarkan bukti. Dalam hal ini, Bappeda Kabupaten Dairi memiliki peran yang penting dalam mendorong perubahan perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih berbasis riset dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses perubahan tersebut dalam praktik perencanaan pembangunan di Kabupaten Dairi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap proses perencanaan, analisis dokumen perencanaan dan kebijakan daerah, serta pencarian data pembangunan yang tersedia secara online. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Dairi mulai menyatukan data-data pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai dasar dalam merumuskan program dan kegiatan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penerapan inovasi dalam pembuatan kebijakan juga turut memperkuat peran Bappeda sebagai

pengarah perencanaan pembangunan. Perubahan ini mendorong perencanaan yang lebih terukur, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perencanaan yang berbasis riset dan inovasi menjadi langkah krusial dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada bukti di Kabupaten Dairi.

*Kata kunci: Pembuatan rencana pembangunan daerah; penelitian dan inovasi; Bappeda; sistem informasi perencanaan; Kabupaten Dairi*

## PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah dasar penting untuk menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui perencanaan yang tepat, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya daerah, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara sistematis dan terukur. Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, perencanaan pembangunan di daerah berhubungan erat dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan pentingnya keterpaduan dan kesinambungan dalam perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan perancangan pembangunan wilayah di Indonesia masih menghadapi beberapa isu asas, walaupun rangka kerja pengawalseliaan telah dipertimbangkan dengan teliti. Proses perencanaan sering kali dilakukan dengan cara tradisional, mengandalkan siklus tahunan, pengalaman sebelumnya, dan metode administratif yang utama. Penggunaan data empiris, hasil studi, dan analisis yang berdasarkan bukti masih cukup terbatas, sehingga perencanaan sering kali kurang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi dengan cepat (Wajdy *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan mungkin tidak tepat sasaran, sulit diukur, dan kurang responsif terhadap isu-isu pembangunan saat ini seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, atau kemajuan teknologi.

Dengan semakin kompleksnya masalah pembangunan, cara perencanaan pembangunan yang berfokus pada riset dan inovasi menjadi semakin penting dan harus segera diterapkan. Penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan data, informasi, dan analisis yang bersifat objektif sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, sedangkan inovasi mendorong munculnya metode, instrumen, dan kebijakan baru yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan daerah (Sarjiyanto *et al.*, 2022). Pendekatan ini selaras dengan prinsip kebijakan berbasis bukti, di mana kebijakan publik disusun berdasarkan fakta dan penemuan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai pengelola informasi dan pengguna data dalam proses pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang peranan yang sangat penting. Bappeda memiliki peran ganda sebagai lembaga yang menyusun dokumen perencanaan dan juga

bertindak sebagai koordinator antar sektor, pengelola data pembangunan, serta fasilitator dalam memanfaatkan riset dan inovasi untuk perumusan kebijakan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus dibuat dengan cara yang terstruktur, didasarkan pada data, dan saling terhubung antar instansi daerah. Ketentuan ini semakin menegaskan peran Bappeda sebagai pihak utama dalam menjamin mutu dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017).

Di Kabupaten Dairi, usaha untuk mencapai perencanaan pembangunan yang didasarkan pada penelitian dan inovasi mulai memperlihatkan kemajuan yang baik. Peningkatan penggunaan data pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan Produk Domestik Regional Bruto, terlihat dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan. Selain itu, penggunaan sistem informasi perencanaan berfungsi sebagai alat yang mendukung pengambilan keputusan. Meskipun demikian, proses perubahan ini masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, integrasi data antar perangkat daerah yang belum maksimal, serta penyesuaian budaya kerja perencanaan yang selama ini bersifat administratif dan rutin.

Berdasarkan situasi tersebut, penting untuk melakukan kajian mengenai perubahan pada perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada penelitian dan inovasi di Bappeda Kabupaten Dairi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai proses perubahan yang sedang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta peran strategis Bappeda dalam mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih berbasis bukti, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **BAHAN DAN METODE**

Pada Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dengan baik proses perubahan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada riset dan inovasi, bukan untuk menghitung hubungan antarvariabel secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendeskripsikan fenomena yang berlangsung secara alami dan sesuai konteks, serta menginterpretasikan makna di balik praktik perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Dairi (Sugiyono, 2021). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan aktual mengenai perubahan peran, metode kerja dan pemanfaatan penelitian dan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan metode deskriptif.

Studi ini dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dairi, yang merupakan lembaga daerah yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam merumuskan serta mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah. Lokasi ini dipilih karena Bappeda berperan penting dalam mendorong perubahan perencanaan yang berdasarkan riset dan inovasi. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dalam satu

periode tertentu yang disesuaikan dengan jadwal kegiatan perencanaan daerah, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung proses perencanaan yang sedang berlangsung.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan analisis dokumen. Pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung kegiatan perencanaan yang berlangsung di lingkungan Bappeda, seperti pertemuan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, penelitian dokumentasi dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai dokumen perencanaan, termasuk RKPD, dokumen pendukung perencanaan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian serta inovasi di daerah. Penggabungan dua teknik ini diterapkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan saling mendukung (Creswell dan Poth, 2018).

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap dengan mengikuti model analisis data kualitatif yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, informasi disajikan dalam bentuk penjelasan naratif agar lebih mudah dimengerti dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk merumuskan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses transformasi perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada riset dan inovasi di Bappeda Kabupaten Dairi (Miles, Huberman, dan Saldaña, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam perencanaan pembangunan yang berfokus pada riset dan inovasi di Kabupaten Dairi telah mulai diterapkan secara nyata dengan disusunnya Rencana Induk dan Peta Jalan untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029. Penyusunan dokumen ini menunjukkan pergeseran cara perencanaan dari yang administratif menjadi perencanaan strategis yang didasarkan pada data, analisis keadaan wilayah, dan proyeksi pembangunan untuk jangka menengah. Metode ini sesuai dengan gagasan perencanaan berbasis bukti, yang menekankan pentingnya pemanfaatan data dan hasil penelitian sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan (Head, 2020).



**Gambar 1.** Pengembangan Perencanaan Berbasis Riset dan Inovasi dengan Menyusun Rencana Pokok, Peta Jalan Iptek.



**Gambar 2.** Materi Prosedur pembuatan rencana utama dan peta jalan untuk IPTEK

Prosedur pembuatan rencana utama dan peta jalan untuk IPTEK dimulai dengan pengumpulan serta pengolahan data mengenai pembangunan daerah. Ini mencakup analisis terhadap kondisi sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan potensi inovasi yang ada di daerah tersebut. Data tersebut selanjutnya disusun menjadi materi presentasi (PowerPoint) yang berfungsi sebagai alat analisis serta sarana komunikasi kebijakan. Penggunaan media presentasi yang didasarkan pada data ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya menghasilkan dokumen resmi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan argumen kebijakan yang logis dan terukur (Sarjiyanto et al. , 2022).

### **Penyampaian Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK sebagai Sarana Belajar Kebijakan.**



**Gambar 3.** Rencana Induk dan Peta Jalan IPTEK sebagai Sarana Belajar Kebijakan

Perubahan dalam perencanaan pembangunan yang berfokus pada riset dan inovasi semakin jelas ditunjukkan melalui pelaksanaan rapat presentasi mengenai Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Dairi, di mana berbagai pihak terkait di daerah turut terlibat. Berdasarkan dokumentasi kegiatan (lihat Gambar 1 dan Gambar 2), pertemuan dilakukan secara resmi di lingkungan pemerintah daerah dengan melibatkan Bappeda, instansi terkait, serta elemen pendukung lainnya. Forum ini berfungsi sebagai tempat penting untuk membahas isi kebijakan IPTEK,

menyamakan prioritas pembangunan, dan menggabungkan sudut pandang dari berbagai sektor.

Partisipasi aktif Bappeda dalam pertemuan pemaparan tersebut menegaskan posisi strategis lembaga ini sebagai pengatur perencanaan pembangunan daerah. Bappeda tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai pemimpin dalam diskusi kebijakan yang mendorong penerapan data dan analisis dalam proses pengambilan keputusan. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan wajib dilaksanakan secara menyeluruh, teratur, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, forum pertemuan tersebut berperan sebagai proses pembelajaran kebijakan, di mana para pelaku pemerintah daerah belajar untuk memahami isu-isu terkait IPTEK dan dampaknya terhadap pembangunan daerah (Head, 2020).

### **Transformasi Metode Kerja dan Budaya Perencanaan di Sekitar Bappeda**

Hasil pengamatan selama proses penyusunan dan presentasi rencana induk IPTEK menunjukkan adanya pergeseran cara kerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembicaraan yang terjadi di dalam forum rapat kini tidak hanya terpusat pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan mulai menyoroti analisis terhadap masalah, hubungan antarprogram, serta kejelasan tahap pelaksanaan peta jalan IPTEK. Penyajian data dan kebijakan secara visual membantu peserta rapat untuk mengerti perencanaan sebagai suatu proses strategis yang fokus pada hasil.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya perencanaan, dari yang sebelumnya bersifat rutin dan mengikuti prosedur, menjadi perencanaan yang lebih analitis dan bekerja sama. Perubahan budaya kerja tersebut sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berdasarkan data, terintegrasi antara berbagai perangkat daerah, dan mampu mengatasi masalah pembangunan secara menyeluruh. Penemuan ini juga memperkuat pandangan yang diajukan oleh Miles dan rekan-rekan. (2020) menyatakan bahwa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara partisipatif dapat memperbaiki pemahaman para pengambil keputusan terhadap masalah yang mereka hadapi.

### **Dampak terhadap Kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah**

Penyusunan dan presentasi Rencana Induk serta Peta Jalan untuk Kemajuan IPTEK Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 memiliki dampak positif terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan menjadi lebih terfokus karena adanya peta jalan yang jelas, langkah-langkah pengembangan yang terukur, serta indikator pencapaian yang dapat dinilai. Kebijakan yang dibuat menjadi lebih logis dan dapat dipertanggungjawabkan karena disusun berdasarkan data nyata dan analisis yang memiliki dasar ilmiah yang jelas (Wajdy et al. , 2023).

Selain itu, partisipasi berbagai pihak dalam proses penyampaian memperkuat koordinasi antar sektor dan menambah komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan IPTEK. Oleh karena itu, kegiatan penyusunan materi untuk perencanaan dan pelaksanaan

rapat pemaparan tidak hanya berperan sebagai proses administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari perubahan perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan riset dan inovasi. Kegiatan ini memperkuat posisi Bappeda Kabupaten Dairi sebagai pelaku utama dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berdasarkan bukti, fleksibel, dan fokus pada peningkatan daya saing daerah melalui penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Dairi telah mengalami pergeseran signifikan ke arah perencanaan berbasis riset dan inovasi. Transformasi tersebut terlihat jelas melalui penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029, yang dibuat berdasarkan analisis data pembangunan, keadaan wilayah, serta arah kebijakan jangka menengah. Penemuan ini menegaskan bahwa perencanaan kini tidak hanya dilihat sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai suatu proses strategis yang berfokus pada kualitas kebijakan dan keberlanjutan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Dairi memiliki peranan penting dalam mendorong perubahan tersebut. Bappeda memiliki peran yang tidak terbatas hanya sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan pengarah dalam proses perencanaan yang berdasar pada bukti. Dengan menggunakan data, mengintegrasikan hasil penelitian, dan menyelenggarakan forum penyampaian kebijakan, Bappeda berhasil meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta merangsang pemahaman bersama tentang pentingnya perencanaan yang didasarkan pada analisis yang logis dan terukur.

Transformasi perencanaan yang didasarkan pada riset dan inovasi ini memberikan dampak positif terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih terarah, memiliki tujuan yang jelas, serta lebih mudah untuk dinilai dampaknya terhadap pembangunan daerah. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk menjaga kelanjutan transformasi, perlu ada penguatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan mutu data, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi agar perencanaan berbasis bukti dapat dilaksanakan secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan riset dan inovasi di Bappeda Kabupaten Dairi merupakan langkah strategis yang penting dan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah lainnya dalam merancang perencanaan pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Head, B. W. (2020). Policy analysis: Evidence based policy-making. In *Public policy* (pp. 281–296). Palgrave Macmillan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Kemendagri RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Sarjiyanto, S., Prasetyo, P. E., & Widodo, S. (2022). Perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Wajdy, R., Hidayat, A., & Putri, D. R. (2023). Tantangan perencanaan pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia*, 7(1), 45–58.